BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Iklm penyelenggaraan negeri sudah berubah beserta adanya reformasi keuangan dan otonomi daerah. Reformasi keuangan dimulai dari tahapan proses keuangan negara yang berawal pada proses perencanaan serta penganggaran sampai pertanggungjawaban dan proses audit. Pihak yang menjalankan roda pemerintah, pelayanan masyarakat, dan pembangunan PemDa untuk mewujudkan transparasi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan supaya menjadikan pemerintah yang bersih (Dyah dan Febriyani, 2012).

Salah satu patokan menurut UU No. 15 tahun 2004 yaitu mengatur hal pokok yang bersangkutan dengan pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam UU ini yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan dan pengelolaan yaitu BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). Pemeriksaan harus mempertimbangkan standar lingkungan profesi audit secara internasional. adapun hasil pemeriksaan oleh BPK setiap daerah disusun dan diperlihatkan dalam laporan hasil pemeriksaan (LPH). Sehingga setelah pemeriksaan selesai dapat memberi sebuah opini. UU No. 32 tahun 2003 tahun 2004 tentang pemda menyatakan pemerintah, baik provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan pemerintahan kota wajib membuat laporan keuangan pribadi.

Upaya konkrit dalam mewujudkan *Good Governance* yang diwujudkan melalui penyajian LKPD atau yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di susun berdasarkan SAP, hasil laporan keuangan yang sudah di

buat sesuai SAP yang kemudian dilaporkan kepada perwakilan DPR atau DPRD serta masyarakat setelah di audit BPK, pemeriksaan dilakukan untuk memberikan opini kewajaran informasi dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban dasar pengambilan keputusan stakeholder, dengan demikian harus dilampiri dengan item pengungkapan (Candra Maulana, 2015). PSAP No 1 paragraf 24 berisi entitas pelapor dalam mengungkapkan tentang ketaatan anggaran. Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai SAP dengan berbasis akrual. 2015 merupakan batas akhir dari laporan keuangan sesuai PP No. 71 Th. 2010. Adapun beberapa alasan PP NO. 71 2010 menggantikan PP No. 24 Th. 2005, 1. Laporan Keuangan menggunakan basis akrual, 2. Komponen dalam laporan keuangan terbagi menjadi (A). Laporan Realisasi anggaran (B). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (C). Neraca (D). Laporan Operasional (E). Laporan Arus Kas (F). Laporan Ekuitas (G). Catatan atas Laporan Keuangan. (Khasanah, 2014). Maka dari itu laporan keuangan negeri harus sesuai PP No. 71 Th. 2010

Model dalam penelitian diharapkan dapat memberi kontribusi kepada semua stakeholder yang memerlukan informasi, akuntabilitas serta transparansi yang dilakukan Pemda dalam bentuk penelitian dan evaluasi atas pengungkapan wajib. Penelitian ini berdasar pada penelitian Ghaniyyu Mintotik, Amir Mahmud (2015). Alasan dipilih penelitian Ghaniyyu Mintotik Waliyyani, Amir Mahmud (2015) sebagai acuan utama dalam penelitian Ghaniyyu Mintotik, Amir Mahmud (2015) terdapat berbagai variabel yang kompleks dan beragam. Tujuan dilakukannya penelitian untuk menguji serta mengukur karakteristik pemda terhadap tingkat pengungkapan sajian laporan keuangan pemerintahan daerah.

Hubungan Variabel umur Pemda dan tingkat pengungkapan bernilai positif , sedangkan variabel lain tidak memengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel kekayaan daerah serta data yang digunakan (laporan keuangan Pemda Jateng periode 2012-2014).

Hasil penelitian menunjukkan fakta yang berbeda-beda menunjukkan bahwa adanya ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya seperti yang dilakukan oleh (Ghaniyyu Mintotik Waliyyani dan Amir Mahmud 2013) menjelaskan hubungan antara usia Pemerintah daerah dengan tingkat pengungkapan LKPD bernilai positif. Sementara dalam penelitian (Khasanah dan Rahardjo 2014) menjelaskan hubungan antara umur Pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD berpengaruh negatif.

Berdasar penelitian (IRIS Indonesia yang berpatner dengan Syahrudin dan Taufik, Werry Darta 2002) dan (Khasanah 2014) bahwa DPRD mempunyai manfaat yang besar untuk pengawasan Pemerintah daerah dalam melakukan aktivitas pemerintahannya hingga didapat hasil kerja yang diinginkan. DPRD juga turut mengawasi pelaporan pemda sehingga kecenderungan pengawasan dalam mempengaruhi pemerintah daerah dalam item pengungkapan laporan keuangan.

Dengan didasari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis berniat mengambil judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2014”

1.2. Rumusan Masalah

Bertolak dari masalah sudah di paparkan, penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang akan dicari penyelesaiannya. Diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah hubungan antara pengaruh size dan laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah 2012-2014?
- 2) Bagaimana hubungan temuan audit dan laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah 2012-2014?
- 3) Bagaimanakah hubungan antara Umur Pemerintah terhadap tingkat pengungkapan LKPD Jawa Tengah berpengaruh signifikan pada periode 2012-2014?
- 4) Apakah Leverage berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD Jawa Tengah periode 2012-2014?
- 5) Bagaimanakah hubungan antara *intergovernmental revenue* terhadap tingkat pengungkapan LKPD Jawa Tengah berpengaruh signifikan pada periode 2012-2014?
- 6) Bagaimana hubungan Kekayaan daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah 2012-2014?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah di uraikan penulis, Adapun hal yang ingin dipaparkan, yaitu :

- 1) Mengetahui hubungan size dan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa tengah 2012-2014.

- 2) Mengetahui hubungan temuan audit dan tingkat pengungkapan laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa tengah 2012-2014.
- 3) Mengetahui hubungan umur pemerintah dan tingkat pengungkapan Laporan keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2012-2014.
- 4) Mengetahui hubungan *leveraged* dan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2012-2014.
- 5) Mengetahui hubungan *intergornmental revenue* dan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2012-2014.
- 6) Mengetahui hubungan kekayaan daerah dan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah daerah Jawa Tengah 2012-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa hal yang ingin didapat penulis dari penelitian yang di lakukan diantaranya :

- 1) Manfaat sesuai teori
 - a. mendapat teori dan pengetahuan pada akuntansi publik, yang terkait tingkat pengungkapan Laporan Keuangan.
 - b. Bidang pendidikan yang dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang juga akan mengadakan penelitian selanjutnya.
 - c. Dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai pengaruh tingkat pengungkapan LKPD.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti
- b. Peneliti di harapkan dapat memberi manfaat untuk mengaplikasikan teori yang sudah ada, dan dapat meningkatkan ilmu dalam peningkatan kompetensi bidang akuntansi sektor publik.
- c. Bagi pembaca
Dapat menambah pengetahuan tentang tingkat pengungkapan LKPD
- d. Bagi Pemerintah Daerah
Menjadi dasar pengevaluasian, serta sebagai bahan acuan pemerintah untuk menetapkan penilaian, punishment dan penghargaan yang dapat diaplikasikan sesuai SAP dalam pengungkapan wajibnya.